






SINYAL PENGHEMATAN NEGARA HINGGA TAHUN DEPAN

Pemerintah tampaknya tidak hanya melakukan penghematan di tahun ini saja. Sang bendahara negara alias Menteri Keuangan memberi sinyal efisiensi bakal dilanjutkan pada 2026. Sri Mulyani menyebutnya sebagai 'budaya baru'. Pemerintah memastikan penghematan tidak berubah dari rencana awal, yakni total Rp306,69 triliun. Protes pun menggemakan karena beberapa kebijakan baru pemerintah malah dinilai sebagai pemberosan. Terbaru, saat anggaran kementerian/lembaga (K/L) hingga daerah di pangkas malah beredar kabar retret kepala daerah di Akademi Militer atau Akmil Magelang, Jawa Tengah, akan dibiayai secara cost sharing. Salah satu sumber pembiayaannya adalah Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Menurut dokumen Kementerian Dalam Negeri dalam Surat Edaran Nomor 200.5/628/SJ daerah harus membayar Rp 22 juta. Gaduh yang terjadi ditanggapi secara reaktif oleh pemerintah. Dalam surat tertanggal 13 Februari 2025, pembiayaan kegiatan direvisi menjadi sepenuhnya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Baca Hal. 2). Tepisan-tepisan bila efisiensi memicu mandeknya program juga kompak dilakukan K/L. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikstisaintek) misalnya, memastikan tidak ada perubahan anggaran soal beasiswa. Begitu juga dengan Kemenkeu yang menegaskan program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) tetap berjalan. Publik bingung?

Baca Hal 11....

Sementara rincian pemangkasan anggaran program lainnya meliputi













perjalanan dinas, belanja barang, belanja modal sebagai berikut:

-  **SBSN:** pagu awal sebesar Rp1,53 triliun, defisiensi 47 persen atau Rp927 miliar
-  **PLN:** pagu awal sebesar Rp688 miliar, defisiensi 30 persen atau sebesar Rp20 miliar
-  **PNBP:** pagu awal Rp839 miliar, defisiensi 62 persen atau Rp520 miliar
-  **BLU:** pagu awal Rp8 triliun, defisiensi 44 persen atau Rp3,5 triliun
-  **Lainnya (RMP dan HLN):** pagu awal Rp49 miliar, defisiensi 17 persen atau sebesar Rp8 miliar.



PENDIDIKAN TINGGI TERDAMPAK EFISIENSI

Rincian anggaran pos belanja Kemendikstisaintek yang terkena dampak efisiensi:

-  **1. Tunjangan Dosen Non-PNS:** Pagu awal Rp2,7 triliun, efisiensi 25% (Rp676 miliar).
-  **2. Beasiswa KIP Kuliah :** Pagu awal Rp14,6 triliun, efisiensi 9% (Rp1,3 triliun).
-  **3. Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) :** Pagu awal Rp164,7 miliar, efisiensi 10% (Rp19,47 miliar).
-  **4. Beasiswa Afiriasi Pendidikan Tinggi (ADik) :** Pagu awal Rp213,73 miliar, efisiensi 10% (Rp21,3 miliar).
-  **5. Beasiswa KNB (Kerja Sama Negara Berkembang) :** Pagu awal Rp85,348 miliar, efisiensi 25% (Rp21 miliar).
-  **6. Beasiswa Dosen & Tenaga Pendidikan :** Pagu awal Rp236,8 miliar, efisiensi 25% (Rp59 miliar).
-  **7. Program Sekolah Unggul Garuda :** Pagu awal Rp2 triliun, efisiensi 60% (Rp1,2 triliun).
-  **8. Bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN) :** Pagu awal Rp6,018 triliun, efisiensi 50% (Rp3 triliun).
-  **9. Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (BPPTNBH) :** Pagu awal Rp2,37 triliun, efisiensi 50% (Rp1,18 triliun), restrukturisasi 30% (Rp711 miliar).
-  **10. Pusat unggulan antar perguruan tinggi (PUAPT) :** Pagu awal Rp250 miliar, efisiensi 50% (Rp125 miliar).
-  **11. Bantuan Kelembagaan PTS :** Pagu awal Rp365,3 miliar, efisiensi 50% (Rp182 miliar).
-  **12. Program Lainnya :** Pagu awal Rp1,9 triliun, efisiensi 43% (Rp832 miliar).

Laut Tangerang Tak Berpagar Bambu Lagi

TNI AL dan petugas gabungan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), PSDKP (Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan), Polairud (Kepolisian Maritim) para nelayan dan instansi terkait di pemerintah daerah, telah membongkar pagar laut sepanjang 30,16 kilometer yang memagari perairan laut di Kabupaten Tangerang, Kamis (13/2/2025). Secara keseluruhan pembongkaran memakan waktu selama 11 hari. Saat ini, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri turun tangan, mengusut dugaan korupsi di kasus penerbitan dokumen Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan SHM, terkait pagar laut Tangerang. Penyelidikan usai mengantongi indikasi praktik rasuah dalam kasus tersebut. (ist.antara)

Batal Iuran Rp 22 Juta/Kepala Daerah, Dana Retret di Magelang Ditanggung APBN

JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeluarkan surat edaran terbaru terkait kegiatan orientasi kepemimpinan atau retret kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil pilkada serentak 2024.

Dalam surat tertanggal 13 Februari 2025 itu, hal yang direvisi ialah tentang pembiayaan kegiatan yang sepenuhnya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Artinya, bukan ditanggung bersama (cost sharing) dengan kepala daerah seperti edaran sebelumnya.

Sebelumnya, setiap kepala daerah harus menyeter biaya akomodasi dan konsumsi untuk orientasi selama satu pekan itu sebesar Rp 2.750.000 x 8 hari. Jika dikalkulasikan, maka masing-masing kepala daerah akan menghabiskan Rp 22 juta untuk retret di Akmil Magelang.

Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 200.5/692/SJ itu bersifat segera dan ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Kamis (13/2/2025). Surat itu ditujukan kepada gubernur dan wakil gubernur; bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di seluruh Indonesia.

Isi surat itu ialah menindaklanjuti SE sebelumnya, yakni Nomor 200.5/628/SJ, yang ditandatangani pada 11 Februari 2025. Surat itu beredar luas di jagat maya, terutama platform X, sejak Rabu-Kamis (12-13/2/2025). Warganet mengkritisi besarnya anggaran yang harus dikeluarkan dalam kegiatan retret kepala daerah di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, karena dilaksanakan di saat pemerintah sedang gencar-gencarnya menghemat atau efisiensi anggaran negara.

"Bersama ini disampaikan bahwa, pembiayaan kegiatan Orientasi Kepemimpinan Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025 selama di Akademi Militer (Akmil) Magelang sepenuhnya dibiayai oleh APBN yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Dalam Negeri," bunyi isi surat edaran yang terbaru tersebut.

Dihubungi terpisah, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiharto telah membenarkan surat edaran terbaru yang diteken Tito pada hari ini.

"Betul," kata Bima, Kamis (13/2/2025).

Bima mengatakan agenda pembekalan tersebut akan diambil dari anggaran Kemendagri, karena pihaknya memiliki mata anggaran



Wamendagri Bima Arya saat meninjau lokasi glamping retreat kepala daerah di Akmil, Kota Magelang, Jawa Tengah, Minggu (9/2/2025) (dok. Kemendagri)

pelatihan dan penguatan kapasitas aparat pemerintah daerah.

"Ini sangat penting agar dalam melaksanakan tugas dan pembuatan kebijakan betul betul memahami proses dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan serta mengawasi APBD mereka," kata dia.

Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan anggaran retreat ratusan kepala daerah hasil Pilkada 2024 di Magelang, Jawa Tengah berasal dari Kemendagri dan pemda.

"Cost sharing antara Kemendagri dengan pemerintah daerah," kata Hasan di Kantor BPOM, Jakarta, Kamis

(13/2/2025), "Detailnya tapi tanya sama Kemendagri."

Diketahui, Sebanyak 481 kepala daerah akan mengikuti retret kepala daerah yang dilaksanakan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, pada 21 hingga 28 Februari 2025. Jumlah yang hadir lebih rendah dari 505 kepala daerah terpilih yang terdiri dari gubernur, bupati, dan wali kota dan dijadwalkan dilantik pada 20 Februari 2025.

Peserta retret lebih sedikit karena tidak menyertakan dua wilayah karena pilkada ulang setelah calon tunggal kalah dari kotak kosong. Dua daerah tersebut adalah Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang.

Di samping itu, 22 kepala daerah Aceh tidak akan mengikuti retret karena jadwal dan teknis pelantikan berbeda dari kepala daerah lain. Khusus untuk Provinsi Aceh, pelantikan akan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Dalam keterangan sebelumnya, Bima mengklaim pembekalan kepala daerah di Akmil Magelang nanti tidak akan boros anggaran karena fasilitas yang akan digunakan berasal dari pembekalan menteri sebelumnya. Mantan wali kota Bogor periode 2019-2024 ini juga mengatakan fasilitas untuk retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, sudah siap untuk digunakan. "Semua sudah siap. Tinggal pengaturan kursi di ruang 2 kelas saja. Air, listrik, tempat tidur semua siap," kata dia. Politikus Partai Amanat Nasional ini telah meninjau langsung lokasi titik kumpul kepala daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta sejak Ahad.

Bima mengatakan lokasi-lokasi yang ditinjau selama kunjungan ke Daerah Istimewa Yogyakarta hanyalah opsi untuk titik kumpul saja. "Itu lokasi titik kumpul saja yang masih ada opsi. Lokasi pembekalan selama 7 hari di Akmil, sudah dipastikan," ujarnya. (din, rls, ant/dya)

Menelisik PT Lembah Tidar Indonesia

NAMA PT Lembah Tidar Indonesia menjadi sorotan setelah muncul dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sebagai tujuan setoran biaya akomodasi dan konsumsi bagi kepala daerah yang akan mengikuti retret atau pembekalan kepemimpinan di Akademi Militer Magelang.

PT Lembah Tidar Indonesia tercantum dalam Surat Edaran Mendagri Nomor 200.5/628/SJ yang mengatur Orientasi Kepemimpinan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025. Meski SE itu belakangan dibatalkan, namun sejumlah pemerintah daerah pun sudah menyeterkan dana retret Rp 22 Juta ke PT Lembah Tidar.

Dalam simulasi hitungan, Apabila dikalikan delapan hari, maka setiap kepala daerah harus membayar Rp2.750.000 x 8 = Rp22.000.000.

Dengan total peserta mencapai 505 kepala daerah, maka anggaran

yang harus dikeluarkan dari APBD seluruh daerah untuk akomodasi dan konsumsi saja mencapai Rp 22.000.000 x 505 = Rp11.110.000.000 atau Rp11,1 miliar.

PT Lembah Tidar diketahui beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomor 1 RT 001/RW 002, Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Jawa Tengah. Alamat yang disebutkan mengarah ke Borobudur International Golf & Country Club yang lokasinya tak jauh dari Akmil.

Selain soal anggaran, nama PT Lembah Tidar Indonesia juga menjadi sorotan karena ternyata perusahaan tersebut merupakan milik dari kader Partai Gerindra. Dalam data di kementerian hukum, PT. Lembah Tidar Indonesia tersebut tercatat milik Heru Irawanto.

Selain sebagai pemilik, Heru juga merupakan kader sekaligus caleg

terpilih dari Partai Gerindra. Dia saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Brebes.

Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad angkat bicara terkait kepemilikan PT. Lembah Tidar Indonesia yang menjadi mitra penyelenggaraan retret kepala daerah di Magelang.

Meski disebutkan perusahaan tersebut milik kader Partai Gerindra, namun Dasco mengaku tidak pernah mendengar terkait adanya kepemilikan partai di perusahaan tersebut.

"Saya belum pernah dengar ini kepunyaan Gerindra. Itu konfirmasi dari saya. Tahu saja enggak, itu kan acaranya Kemendagri," kata Dasco. (wid, rls, kcm/dya) gabah dan/atau Poktan/Gapoktan mengirim ke makloon. Nantinya, mitra makloon akan mengolah GKP menjadi beras. (wid, rls, bis/dya)

Baru 4 Bulan Dilantik, KLB Gerindra Minta Prabowo Maju Capres Lagi di 2029

BOGOR- Meski pemerintahan Prabowo Subianto baru berumur 4 bulan yaitu sejak resmi dilantik pada 20 Oktober 2024, tapi sudah diminta maju lagi dalam Pemilu 2029.

Hal itu menjadi salah satu hasil kongres luar biasa (KLB) Partai Gerindra sekaligus rapat pimpinan nasional di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Kamis (13/2/2025). Acara ini juga merupakan rangkaian dari HUT ke-17 Gerindra.

Wakil Ketua Umum Gerindra, Rahayu Saraswati, mengatakan hasil dari rapimnas ini sepakat agar Prabowo kembali memimpin Gerindra hingga 2030. "Iya tadi sudah rapimnas," kata Sara.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI ini mengatakan, Prabowo langsung disahkan untuk kembali memimpin Gerindra. "Iya dan sudah sah (Prabowo lanjut memimpin Gerindra)," tutur keponakan Prabowo ini.

Selain itu, hasil Kongres Luar Biasa juga meminta Prabowo untuk kembali maju sebagai capres di Pilpres 2029.

Sementara Menteri Hukum Supratman Andi Agtas yang juga kader Gerindra membeberkan apa yang dibahas oleh Prabowo. "Jadi menghasilkan beberapa keputusan yang pertama, laporan pertanggungjawaban pengurus DPP baik oleh Ketum dan Ketua Dewan Pembina telah diterima dengan baik oleh seluruh peserta dari DPC, DPD sampai DPP. Tidak ada satu pun pihak yang menolak," kata Supratman kepada wartawan.

Eks Ketua Baleg DPR ini mengatakan Prabowo menitip pesan kepada seluruh kader Gerindra untuk bekerja keras demi kepentingan Indonesia. "Bapak Presiden sekaligus Ketum Gerindra Prabowo memesan kepada seluruh kader partai tolong perjuangkan cita-cita partai yang sejalan dengan cita-cita bangsa kita untuk mewujudkan Indonesia makmur, sejahtera, berkeadilan," kata Supratman.

"Dan sekaligus mengingatkan kita semua, cita-cita Gerindra sejak didirikan sesuai dengan ketentuan Pasal 33 UUD 1945," tutur dia.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa KLB Gerindra menghasilkan lima keputusan. Pertama, menerima laporan pertanggungjawaban DPP Partai Gerindra periode 2020-2025.



Prabowo ditetapkan sebagai Ketua Umum DPP Partai Gerindra periode 2025-2030.dok

Kedua, menetapkan kembali Prabowo sebagai Ketua Umum DPP Partai Gerindra periode 2025-2030. Kata Muzani, keputusan itu atas permintaan seluruh DPC dan DPD yang hadir.

"Ketika ditanya, beliau menyatakan bahwa jika itu adalah permintaan kader, maka beliau siap menerima," kata Muzani.

Ketiga, menetapkan Prabowo sebagai Ketua Dewan Pembina. Keempat, menetapkan Prabowo sebagai formatur tunggal.

Kongres memberikan mandat kepada Prabowo sebagai formatur tunggal untuk menyempurnakan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, serta susunan pengurus DPP Partai Gerindra.

Kelima, meminta Prabowo menjadi calon presiden dari Partai Gerindra pada Pilpres 2029. Kongres meminta Pak Prabowo agar bersedia maju kembali sebagai calon presiden pada Pilpres 2029.

Khusus poin kelima, Prasetyo Hadi yang juga menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) itu mengungkapkan bahwa Prabowo meminta waktu. Menurut dia, Prabowo akan memberi jawaban pada waktunya. Lagi pula, saat ini pemerintahan baru dimulai.

Namun, Pras meyakini Prabowo akan menerima mandat itu jika telah

diminta Kongres. "Tapi, insyaallah lah. Kalau memang itu amanat dari kongres insyaallah beliau akan menerima itu. Tapi minta waktu dulu," kata Pras.

Alasan Mendadak KLB

Sementara itu, Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPP Partai Gerindra, Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa semula forum yang digelar di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor itu akan menggelar Rapimnas.

Namun, kata Pras, semua pengurus terutama dari tingkat provinsi dan kabupaten kota meminta agar forum Rapimnas diubah menjadi KLB. Forum KLB diminta untuk menetapkan Prabowo sebagai ketua umum.

"Jadi, pada Februari ini kita tadinya menggelar Rapimnas. Tapi semua kader DPD, DPC, menyampaikan pandangan bahwa menghendaki forum Rapimnas menjadi forum KLB dan memohon kesediaan Pak Prabowo untuk menjadi ketua dewan pembina sekaligus ketua umum lagi," kata Prasetyo saat dihubungi.

"Jadi tidak ada alasan. Alasannya karena permohonan dari kader dan sesuai AD ART kita sehingga hari ini langsung digelar KLB," imbuhnya.

Sementara, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani menjelaskan Rapimnas yang

digelar Februari 2025 merupakan amanat dari Rapimnas yang digelar sebelumnya pada Februari 2024.

Rapimnas kala itu melaporkan kepada Ketua Umum agar Kongres atau KLB digelar pada Februari bertepatan dengan HUT ke-17 partai.

"Hari ini, kita mengadakan Rapimnas dengan tujuan tersebut. Namun, seluruh DPD dan DPC meminta kepada Ketua Dewan Pembina agar Kongres Luar Biasa diselenggarakan dalam forum ini," kata Muzani usai acara.

Merujuk AD/ART, terang Muzani, KLB bisa digelar jika diminta 2/3 pengurus DPD. Namun, dalam Rapimnas, 100 persen DPD meminta agar digelar KLB. Setelah ada aspirasi itu, Muzani mengaku meminta persetujuan itu ke Prabowo selaku Ketua Dewan Pembina dan dia menyetujui.

"Pagi tadi, saat Rapimnas dimulai, kami menyampaikan aspirasi tersebut. Ketua Dewan Pembina menyatakan bahwa jika itu adalah kehendak kader dan partai, maka forum ini boleh menjadi forum KLB," katanya.

"Sebagai pimpinan sidang sementara, saya mengetok palu dan menetapkan forum ini menjadi KLB. Maka, pada Kamis, 13 Februari, Gerindra mengadakan KLB ke-7," imbuh Muzani. (wid, rls, ist/dya)

Vonis Ultra Petita untuk Harvey Moeis Cs di Kasus Timah

DAFTAR LENGKAP VONIS TERBARU HARVEY MOEIS CS



Harvey Moeis

Divonis 20 Tahun Penjara lebih tinggi dari tuntutan jaksa yaitu 12 tahun penjara. Sedangkan dalam putusan Pengadilan

Negeri Tipikor, Harvey divonis 6,5 tahun penjara. Mulanya uang pengganti yang dibebankan kepada Harvey dari Rp 210 miliar kurungan selama 6 bulan. Helena juga dihukum Harvey membayar denda Rp 1 miliar juta subsider 8 bulan kurungan.



Helena Lim

Helena Lim menjadi 10 tahun penjara. Di pengadilan tingkat pertama, Helena divonis 5 tahun

penjara. Helena juga dihukum membayar denda sebesar Rp 1 miliar. Apabila tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara kurungan selama 6 bulan. Helena juga dihukum dengan denda Rp 750 juta subsider 6 bulan penjara. Dia juga dihukum membayar uang pengganti Rp 900 juta.



Eks Dirut PT Timah

Eks Direktur Utama (Dirut) PT Timah Tbk Mochtar Riza Pahlevi Tabrani dihukum 20 tahun

penjara. Juga dijatuhi denda sebesar Rp 1 miliar subsider 6 bulan penjara. Mochtar juga dihukum membayar uang pengganti senilai Rp Rp 493 miliar. Pada pengadilan tingkat pertama, Mochtar Riza divonis 8 tahun penjara dan membayar denda Rp 750 juta. Apabila denda tak dibayar, diganti dengan 6 bulan kurungan. Sedangkan jaksa menuntut Suparta 12 tahun penjara.



Bos Smelter

Direktur Utama PT Refined Bangka Tin (RBT) sejak 2018, Suparta, divonis 19 tahun

penjara dan denda Rp 1 miliar atau kurungan selama 6 bulan. Dan membayar uang pengganti Rp 4,57 triliun. Jika tak dibayar, diganti hukuman kurungan 10 tahun. Dalam pengadilan tingkat pertama, Suparta mulanya divonis 8 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Sedangkan jaksa menuntut Suparta 14 tahun penjara.



Direktur PT RBT

Direktur Pengembangan Usaha PT RBT tahun 2017, Reza Andriansyah, divonis 10 tahun

penjara. Reza juga dihukum membayar denda sebesar Rp 750 juta subsider 3 bulan kurungan. Reza mulanya divonis 5 tahun penjara pada pengadilan tingkat pertama. Namun vonis itu lebih rendah dari tuntutan jaksa, yakni 8 tahun penjara.



Kuasa hukum Harvey Moeis Junaedi Saibih mengkritik putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memperberat vonis Harvey dan terdakwa lain dalam kasus dugaan korupsi timah. Ist

Tin (RBT) divonis 19 tahun. Terakhir Direktur Pengembangan Usaha PT RBT tahun 2017, Reza Andriansyah, divonis 10 tahun penjara. Vonis ultra petita adalah putusan yang sesuai dengan tuntutan jaksa atau lebih.

Dirangkum, Kamis (13/2/2025), majelis hakim tingkat pertama sebelumnya menjatuhkan hukuman kepada suami Sandra Dewi itu 6,5 tahun penjara. Harvey dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi pengelolaan timah yang merugikan negara hingga Rp 300 triliun.

Namun vonis itu diubah Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta pada hari ini. Hukuman Harvey ditambah 13,5 tahun dari sebelumnya. Artinya, vonis Harvey menjadi 20 tahun penjara. Vonis ini merupakan ultra petita, yakni putusan yang sesuai dengan tuntutan jaksa atau lebih. Harvey juga diwajibkan membayar denda Rp 1 miliar juta subsider 8 bulan kurungan.

Untuk jumlah denda, tidak ada yang beda dengan putusan tingkat pertama. Pengadilan Tipikor Jakarta sebelumnya mewajibkan Harvey membayar denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan.

Mahkamah Agung enggan mengomentasi putusan banding vonis Harvey Moeis yang diperberat menjadi 20 tahun penjara. Juru bicara MA Yanto mengatakan hakim dilarang berkomentar terhadap perkara yang sedang berjalan maupun tidak.

Yanto pun mempersilakan masyarakat untuk menilai sendiri apakah putusan banding itu adil atau tidak. "Masalah adil atau tidak biar masyarakat yang menilai," ucap Yanto kepada wartawan di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat.

Sementara, Kejaksaan Agung (Kejagung) menghormati putusan hakim Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta yang memperberat vonis Harvey Moeis.

"Tentu kita menghormati putusan yang telah diambil oleh hakim atas

banding JPU, apalagi yang bersangkutan dihukum penjara maksimal selama 20 tahun termasuk pengenaan uang pengganti dan subsidiernya," kata Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar, kepada wartawan, Kamis (13/2/2025).

Kejagung menyebut hakim Pengadilan Tinggi memiliki kewenangan sepakat atau tidak dengan putusan pengadilan tingkat pertama.

"Inilah mekanisme persidangan, di mana hakim pengadilan yang lebih tinggi boleh sependapat atau tidak sependapat dengan putusan pengadilan di bawahnya dengan pertimbangan-pertimbangannya antara lain aspek keadilan hukum dan masyarakat," kata Harli.

Harli mengatakan Kejagung belum menerima salinan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta karena baru saja dibacakan. Oleh karena itu, untuk menentukan sikap apakah menerima atau tidak, Kejaksaan akan melihat sikap suami Sandra Dewi itu dalam waktu 14 hari ke depan.

"Bagaimana langkah selanjutnya tentu sangat tergantung pada sikap Terdakwa, di mana sesuai hukum acara, putusan Pengadilan Tinggi ini harus diberitahukan dulu kepada pihak-pihak. Selanjutnya, setelah Terdakwa menerima salinan putusan, akan menentukan sikap dalam waktu 14 hari apakah menerima putusan atau tidak," kata Harli.

"Jika menerima, putusan sudah berkekuatan hukum tetap dan, jika tidak menerima, Terdakwa dapat mengajukan upaya hukum kasasi," imbuhnya.

PN Japkus Perlu Ditelusuri

Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Universitas Mulawarman (Unmul), Herdiansyah Hamzah menilai vonis 6 tahun penjara terhadap Harvey Moeis yang sebelumnya dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perlu ditelusuri. Ia menilai vonis di pengadilan tingkat pertama itu jauh dari vonis 20 tahun penjara yang diputuskan hakim Pengadilan Tinggi Jakarta di tingkat banding.

"Saya pikir penting vonis di tingkat PN Jakarta Pusat sebelumnya yang hanya 6 tahun itu sebenarnya aneh dan mencurigakan. Jadi sebaiknya memang ada upaya menelusuri lebih jauh apa penyebabnya. Bisa jadi kemudian ada relasi kepentingan tarik menarik di dalam proses penetapan yang bagi kita kan sangat janggal," kata Herdiansyah.

Herdiansyah mengatakan keanehan vonis 6 tahun itu tak mencerminkan rasa keadilan. Pasalnya, kasus korupsi yang menjerat Harvey Moeis itu merugikan negara hingga Rp300 triliun yang disebutkan oleh Kejaksaan Agung. Maka dari itu, Herdiansyah menilai perlu didalami apakah ada permainan di balik vonis Harvey Moeis tersebut.

"Bagaimana mungkin dengan nilai kerugian sebesar itu hanya divonis 6 tahun. Maka penting fenomena yang aneh semacam ini ditelusuri lebih lanjut untuk digali apakah memang ada indikasi dalam tanda petik permainan di dalamnya suap, dan gratifikasi memungkinkan," katanya.

Kuasa hukum Harvey Moeis, Junaedi Saibih, menilai rule of law atau prinsip negara hukum yang menjamin keadilan dan supremasi hukum di Indonesia telah wafat.

"Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah wafat rule of law pada hari Kamis, 13 Februari 2025, setelah rilisnya bocoran putusan pengadilan tinggi atas banding yang diajukan JPU terhadap putusan PN Jakarta Pusat," kata Junaedi, Kamis (13/2/2025).

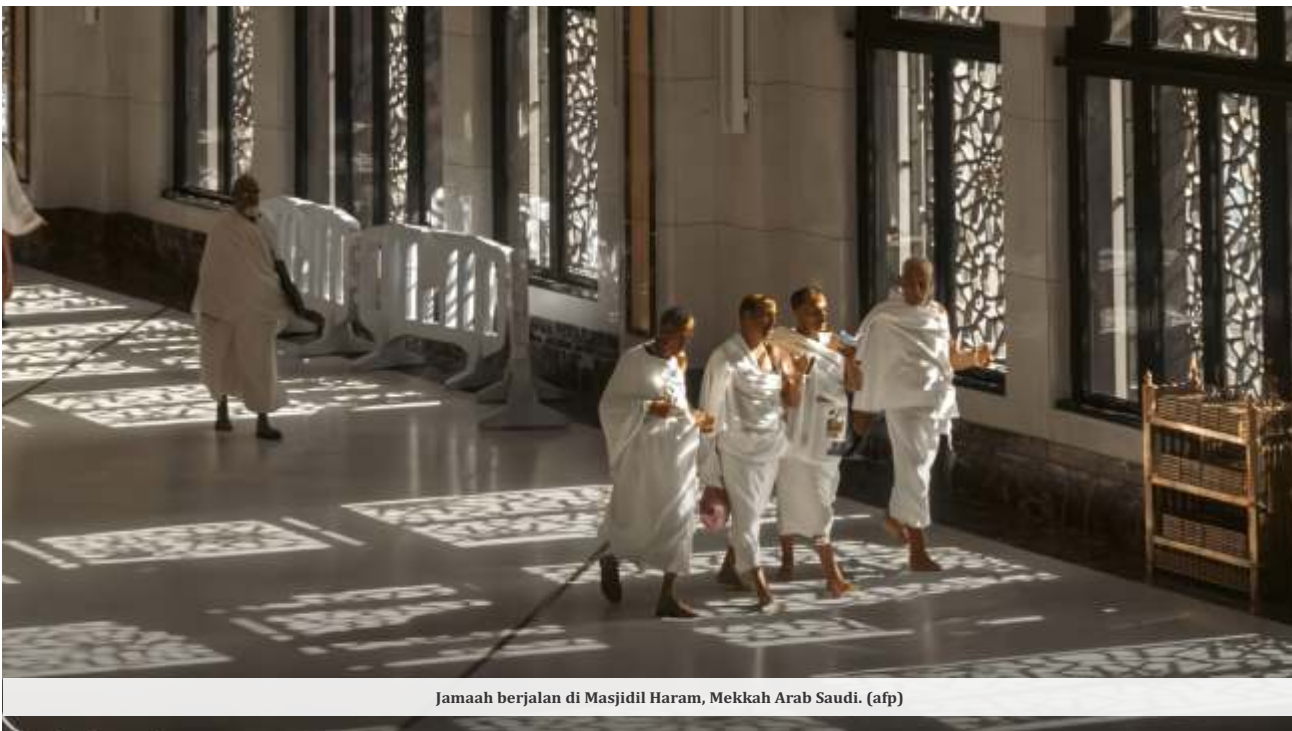
Junaedi pun meminta publik untuk mendoakan penegakan hukum di Indonesia supaya bisa berjalan berdasarkan aturan yang berlaku. Ia lantas menyinggung istilah Latin "ratio legis" yang tidak boleh kalah dengan "ratio populis". Adapun ratio legis adalah alasan atau tujuan di balik pembuatan undang-undang.

Dalam penjelasan lain, ratio legis juga bisa diartikan sebagai pemikiran hukum yang berdasarkan akal sehat dan nalar. Sementara itu, ratio populis kerap diartikan sebagai penilaian masyarakat. "Mohon doanya agar hukum dapat tegak kembali dan ratio legis tidak boleh kalah oleh ratio populis, apalagi akrobatik hukum atas penggunaan ketentuan hukum yang salah adalah pembangkangan atas legalitas," kata Junaedi. (wid, din,

JAKARTA-Putusan Harvey Moeis Cs di tingkat banding jauh lebih tinggi dari vonis pada tingkat pertama. Hukuman Harvey misalnya, yang sebelumnya di bawah tuntutan jaksa yaitu 6,5 tahun kini bertambah 13,5 tahun atau menjadi 20 tahun.

Vonis Ultra Petita juga berlaku untuk Helena Lim menjadi 10 tahun dan eks Direktur Utama (Dirut) PT Timah Tbk Mochtar Riza Pahlevi Tabrani juga 20 tahun. Sementara Direktur Utama PT Refined Bangka

Catat! Pelunasan Biaya Haji 2025 Dibuka 14 Februari



Jamaah berjalan di Masjidil Haram, Mekkah Arab Saudi. (afp)

JAKARTA - Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian agama akan membuka pelunasan biaya haji 1446 H/ 2025 M pada 14 Februari 2025. "Pelunasan Bipih jamaah haji reguler 1446 H mulai 14 Februari-14 Maret 2025," ujar Dirjen PHU Hilman Latief dalam rilisnya, Kamis (13/2/2025).

Hilman mengungkapkan, setiap jamaah haji sudah membayar setoran awal Rp 25 juta. Rata-rata dari mereka juga mendapat nilai manfaat yang masuk melalui virtual account sekitar Rp2 juta.

"Sehingga mereka dalam proses pelunasan nanti tinggal membayar selisihnya," sambung Hilman.

Keppres Biaya Haji Keppres Nomor 6 tahun 2025 ditandatangani Presiden pada 12 Februari 2025. Keppres ini mengatur Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) per embarkasi.

"Ketentuan biaya ini berlaku bagi jamaah haji, Petugas Haji Daerah (PHD), dan Pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU)," ujar Dirjen PHU Hilman Latief.

"Besaran Bipih jamaah haji ini dipergunakan untuk biaya: penerbangan haji, sebagian biaya akomodasi di Makkah, dan sebagian biaya akomodasi di Madinah, biaya hidup (living cost)," papar Hilman.

Selain itu, Kementerian Agama (Kemenag) kini mewajibkan seluruh jamaah haji reguler dan petugas haji 1446 H/2025 memiliki BPJS Kesehatan aktif.

Direktur Pelayanan Haji Dalam

Negeri Kemenag Muhammad Zain mengatakan aturan jamaah haji memiliki BPJS aktif ini akan diatur dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) tentang teknis pengisian kuota haji reguler dan pelunasan biaya haji 2025.

"Jadi jamaah reguler wajib memastikan kepesertaan BPJS Kesehatan mereka aktif sebelum keberangkatan. Tujuannya adalah memberikan perlindungan kesehatan yang menyeluruh, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga kepulangan ke tanah air," ujar Zain dalam keterangannya.

Ia menambahkan BPJS Kesehatan memberikan perlindungan kesehatan sebelum dan setelah perjalanan haji. Jika jamaah sakit sebelum dan setelah keberangkatan, lanjutnya, biaya perawatan akan ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

"Namun, perbedaannya adalah tahun ini seluruh jamaah haji reguler wajib memiliki JKN yang aktif. Sebelumnya, kepesertaan BPJS tidak menjadi syarat mutlak. Dengan aturan baru ini, kesehatan jamaah lebih terjamin, baik sebelum keberangkatan maupun setelah kepulangan," kata Zain.

Zain berharap seluruh jamaah memastikan kepesertaan BPJS Kesehatan mereka aktif sebelum berangkat.

Dengan perlindungan ini, ia berharap jamaah dan petugas haji dapat merasa lebih aman dan nyaman dalam menjalankan ibadah. Sebab, kesehatan mereka tetap terjamin sejak persiapan hingga setelah kembali ke Indonesia.

"Kita berharap semua jamaah mendapatkan haji maqbul dan

mabrur. Insya Allah," kata Zain.

Arab Saudi sebelum ya telah menetapkan kuota haji bagi jamaah asal Indonesia di tahun 2025 ini sebanyak 221.000 jamaah.

Anggaran Badan Haji Dipotong

Badan Penyelenggara Haji juga erkena efisiensi hingga Rp 71.112.886.000. Aspek yang terdampak adalah anggaran bina haji hingga pengawasan penyelenggaraan haji.

Hal ini dikatakan Kepala Badan Penyelenggara Haji Mochammad Irfan Yusuf saat rapat bersama Komisi VIII DPR RI, Kamis (13/2/2025). Dengan pemangkasan ini, pagu anggaran yang semula diketok sebesar Rp 179.739.976.000 (miliar) kini menjadi Rp 108.627.090.000. Angka itu pun disepakati oleh Komisi VIII DPR RI.

"Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan Anggaran Rekonstruksi Tahun 2025 Badan Penyelenggara Haji sebesar Rp 71.112.886.000, yang semula pagu awal sebesar Rp 179.739.976.000 sehingga pagu akhir anggaran tahun 2025 menjadi sebesar Rp 108.627.090.000," kata Ketua

Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang saat membacakan kesimpulan rapat.

Saat rapat tersebut, Irfan Yusuf memaparkan pos anggaran apa saja yang terkena efisiensi. Pemotongan paling besar terjadi pada pos dukungan bina haji yang semula memiliki pagu Rp 47,6 miliar menjadi Rp 11,3 miliar saja. (wid, rls, ist/dya)

g. Embarkasi Solo
sebesar Rp55.478.501,00

h. Embarkasi Surabaya
sebesar Rp60.955.751,00

i. Embarkasi Balikpapan
sebesar Rp57.235.421,00

j. Embarkasi Banjarmasin
sebesar Rp59.331.751,00

k. Embarkasi Makassar
sebesar Rp57.670.921,00

l. Embarkasi Lombok sebesar
Rp56.764.801,00 m.

m. Embarkasi Kertajati
sebesar Rp58.875.751,00

BESARAN BIPIH PHD DAN PEMBIMBING KBIHU:

a. Embarkasi Aceh
sebesar Rp80.900.841,00

b. Embarkasi Medan
sebesar Rp81.955.039,00

c. Embarkasi Batam
sebesar Rp88.310.259,00

d. Embarkasi Padang
sebesar Rp85.760.259,00

e. Embarkasi Palembang
sebesar Rp88.390.259,00

f. Embarkasi Jakarta (Pondok Gede dan Bekasi)
sebesar Rp92.854.259,00

g. Embarkasi Solo
sebesar Rp89.457.009,00

h. Embarkasi Surabaya
sebesar Rp94.934.259,00

i. Embarkasi Balikpapan
sebesar Rp91.213.929,00

j. Embarkasi Banjarmasin
sebesar Rp93.310.259,00

k. Embarkasi Makassar
sebesar Rp91.649.429,00

l. Embarkasi Lombok
sebesar Rp90.743.309,00

m. Embarkasi Kertajati
sebesar Rp92.854.259,00

BESARAN BIPIH JAMAAH HAJI:

a. Embarkasi Aceh
sebesar Rp46.922.333,00

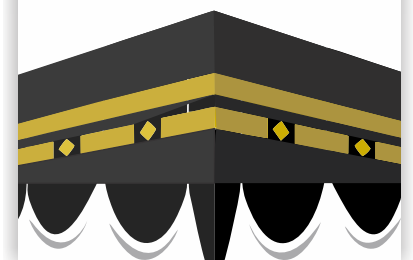
b. Embarkasi Medan
sebesar Rp47.976.531,00

c. Embarkasi Batam
sebesar Rp54.331.751,00

d. Embarkasi Padang
sebesar Rp51.781.751,00

e. Embarkasi Palembang
sebesar Rp54.411.751,00

f. Embarkasi Jakarta (Pondok Gede dan Bekasi)
sebesar Rp58.875.751,00



Dana Transfer Terpangkas Rp 37 M, Proyek Jalan di Kota Malang Tertunda

MALANG - Sejumlah proyek perbaikan infrastruktur jalan di Kota Malang terancam tertunda. Hal ini akibat efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, yang memangkas dana transfer ke Pemerintah Kota (Pemkot) Malang sebesar Rp 37,49 miliar.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPR-PKP) Kota Malang, Dandung Djulharjanto, mengungkapkan pemangkasan ini meliputi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sebesar Rp 25 miliar dan Dana Alokasi Umum (DAU) bidang infrastruktur senilai Rp 12 miliar.

"Semuanya terkait dengan infrastruktur jalan. Pemangkasan ini dilakukan sebagai bagian dari kebijakan efisiensi yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 dan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 29 Tahun 2025," ujar Dandung, Kamis (13/2/2025).

Dandung menjelaskan, pemangkasan dana DAK akan berdampak pada beberapa ruas jalan

yang sebelumnya direncanakan untuk diperbaiki. Jalan-jalan tersebut antara lain Jalan Simpang LA Sucipto, Jalan Rajasa, Jalan Raya Pasar Induk Gadang, dan Jalan Gadang Bumiayu.

Sementara itu, sambungnya, pemangkasan DAU akan berpengaruh terhadap perbaikan infrastruktur di Jalan Bromo, Jalan Wilis, Jalan Retawu, Jalan Bondowoso, Jalan Gede, Jalan Raya Arjowinangin, Jalan Peltu Suhono, Jalan Niaga, Jalan Sonokembang, dan Jalan Raya Janti.

Lebih lanjut, Dandung juga menjelaskan apabila terdapat efisiensi dari anggaran DPUPR-PKP, maka dana yang tersisa berpotensi dialihkan untuk memperbaiki jalan-jalan tersebut. Namun, keputusan akhir tetap akan mempertimbangkan skala prioritas.

"Kalau memang ada peralihan anggaran, kita lihat dulu prioritasnya. Jangan sampai hanya sebagian ruas jalan yang diperbaiki. Kalau pun ada peralihan, ya. Jadi harus bisa menuntaskan satu ruas jalan secara penuh, bukan setengah-setengah," jelasnya.

Namun, ketika disinggung terkait perbaikan jalan yang rusak atau bergelombang, Dandung memastikan anggaran perbaikan akan tetap tersedia dalam dana insidental APBD Kota Malang 2025. "Jadi untuk yang DAK dan DAU itu jalan yang sudah diprogramkan menggunakan DAK dan DAU, di luar insidental," paparnya.

Selain itu, ditegaskannya, infrastruktur jalan yang didanai DAK hanya mencakup wilayah Kecamatan Kedungkandang dan Blimbing. Dengan pemangkasan ini, sejumlah proyek di dua kecamatan tersebut kemungkinan akan ditunda atau mengalami penyesuaian.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang, Subkhan, mengonfirmasi



Salah satu lokasi ruas jalan yang terimbas efisiensi anggaran DAK dan DAU di Kota Malang. (Santi/Lenteratoday)

pemangkasan dana transfer ini merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan (SK) Menteri Keuangan terkait pengurangan DAU dan DAK.

"Totalnya ada Rp 37.496.594.000. Semua ada di DPUPR-PKP. Untuk Kota Malang dana transfer berkurang dari DAU yang ditentukan, dan DAK bidang jalan," tegas Subkhan. (Santi/Dya)

Dana Hibah untuk 390 Tempat Ibadah Disiapkan Pemkab Malang di 2025



Salah satu masjid di Kecamatan Turen yang mendapatkan bantuan hibah untuk perbaikan. (dok. Prokopim Kab Malang)

MALANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) mengalokasikan hibah perbaikan bagi 390 tempat ibadah pada tahun 2025. Setiap tempat ibadah akan menerima bantuan sebesar Rp 15 juta, kecuali untuk tempat ibadah tertentu yang membutuhkan renovasi lebih besar.

Agus menjelaskan, besaran hibah Rp 15 juta berlaku untuk seluruh tempat ibadah yang masuk dalam daftar penerima, baik masjid, gereja, pura, maupun tempat ibadah umat lainnya. Namun menurutnya, untuk masjid yang menjadi lokasi Suling Keliling (Suling) oleh Bupati Malang, alokasi anggarannya dapat lebih besar.

"Masjid yang menjadi lokasi Suling ada sekitar 40 titik. Karena ada pertimbangan kebutuhan pekerjaan renovasi yang lebih banyak, anggarannya bisa disesuaikan," tambahnya.

Dijelaskannya, tidak semua tempat ibadah dapat langsung menerima hibah ini. Menurutnya, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Salah satunya yaitu prioritas diberikan kepada tempat ibadah yang telah mengajukan permohonan sejak tahun-tahun sebelumnya, mulai dari 2022 hingga 2024.

Selain itu, tempat ibadah juga wajib memiliki piagam pendirian dari Kementerian Agama (Kemenag) sebagai bentuk legalitas formal. "Itu mutlak, karena menunjukkan tercukupinya legalitas formal," tambah Agus.

Tak hanya itu, menurutnya pengelola tempat ibadah juga harus menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), memiliki rekening Bank Jatim atas nama takmir atau pengelola, serta mengantongi

surat keterangan domisili yang menunjukkan keberadaan tempat ibadah di wilayah Kabupaten Malang.

"Pencairan hibah juga harus didasarkan pada Surat Keputusan (SK) Bupati, yang menjadi dasar utama dalam realisasi dana," bebernya.

Agus mengatakan, perencanaan hibah ini akan mulai berjalan pada triwulan pertama 2025, sementara pencairan dana diperkirakan dapat dilakukan pada Maret hingga April. "Kita tetap akan melakukan pemanggilan panitia penerima bantuan. Kalau syaratnya sudah lengkap, pencairan bisa langsung dilakukan," ungkapnya.

Lebih lanjut, Agus menjelaskan dana hibah ini dapat digunakan untuk 3 keperluan utama, yaitu penyediaan sarana dan prasarana, pemeliharaan, serta renovasi. "Sarana prasarana bisa berupa pembelian karpet, AC, atau perlengkapan lain. Pemeliharaan bisa untuk pengecatan, sedangkan renovasi bisa mencakup perbaikan toilet, tempat wudu, dan lainnya," katanya. (Santi/Dya)

Ledakan Besar di Taiwan Tewaskan 5 Orang



Foto bangunan yang rusak setelah ledakan gas di pusat perbelanjaan Taichung di Taichung, Taiwan, 13 Februari 2025, dalam tangkapan layar yang diperoleh dari sebuah video. CTI via REUTERS

TAICHUNG - Ledakan besar terjadi di Kota Taichung, Taiwan, terjadi pada Kamis (13/2/2025) menyebabkan lima orang tewas dan beberapa luka-luka.

Sebuah ledakan terjadi di food court lantai 12 department store Shin Kong Mitsukoshi di Kota Taichung.

Badan Pemadam Kebakaran Nasional mengatakan, saat ledakan terjadi, area tersebut sedang ditutup

untuk pekerjaan konstruksi.

Video yang diunggah di media sosial menunjukkan momen ledakan terjadi, yang diiringi bongkahan puing-puing besar serta kepulan asap hitam.

Liao Yu-fu (26) mengatakan kepada AFP bahwa dirinya terbangun dari tidur siang akibat suara ledakan dan mengira bunyi itu suara "pesawat menabrak rumah." "Ada getaran,

bahkan tempat tidur saya bergetar," kata Liao, yang dapat melihat department store dari rumahnya.

"Suara itu berlangsung lama dan saya takut," ucapnya.

Seorang wanita yang berada di lantai enam toko pada saat itu mengatakan ada "getaran yang sangat keras" yang disusul jatuhnya puing-puing.

"Awalnya, kami mengira itu gempa bumi," kata perempuan tersebut kepada TVBS.

"Ketika saya berjalan menuruni tangga, ada pecahan kaca di setiap lantai di pintu masuk lift. Setiap lantai terdampak," kata dia.

Pemadam kebakaran Taiwan telah mengerahkan 56 mobil pemadam kebakaran dan 136 petugas beserta seekor anjing dan drone untuk melakukan penyelamatan.

Masyarakat telah diimbau untuk menjauhi lokasi ledakan.

Diketahui sekitar pukul 11.30 waktu setempat, tiba-tiba sebuah ledakan terjadi di ketinggian mal hingga membuat bagian kaca-kaca berantakan dan terlempar keluar.

Nampak jendela tinggi di langit-langit bangunan juga hancur berkeping-keping.

Diduga ledakan itu dipicu kebocoran gas saat tangki bensin sedang diganti di food court mal.

Wali Kota Taichung Lu Shiow-yen menyebut, operasi penyelamatan sedang berlangsung termasuk laporan adanya orang-orang yang terjebak di lift gedung yang terganggu.

Biro Pemadam Kebakaran Taichung menerima laporan ledakan tersebut pada pukul 11.33 pagi dan petugas pemadam kebakaran serta ambulans dikerahkan ke lokasi kejadian.

Pemerintah daerah Kota Taichung telah mengeluarkan pemberitahuan darurat mengenai ledakan gas tersebut dan berjanji akan memperketat pengawasan terhadap prosedur keselamatan di proyek konstruksi guna mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

Peristiwa ini menambah daftar panjang insiden terkait kebocoran gas dan masalah keamanan bangunan di kawasan perkotaan. (AFP, The straits times, ist/nei)

Intelijen AS: Israel Berencana Serang Situs Nuklir Iran

WASHINGTON - Intelijen AS memperingatkan bahwa Israel kemungkinan akan meluncurkan serangan pendahuluan terhadap program nuklir Iran pada pertengahan tahun, Washington Post melaporkan yang mengutip beberapa laporan intelijen.

Dilansir dari TRT World, Kamis (13/2/2025), serangan semacam itu akan menghambat program nuklir Iran selama berpekan-pekan atau berbulan-bulan, sambil meningkatkan ketegangan di kawasan itu dan berisiko menimbulkan konflik yang lebih luas, menurut beberapa laporan intelijen dari akhir pemerintahan Biden dan awal pemerintahan Trump, surat kabar itu melaporkan pada Rabu (12/2/2025).

Gedung Putih menolak berkomentar. Washington Post mengatakan, pemerintah Israel, CIA, Badan Intelijen Pertahanan, dan Kantor Direktur Intelijen Nasional menolak berkomentar.

Brian Hughes, Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, mengatakan kepada harian itu bahwa Presiden Donald Trump "tidak akan mengizinkan Iran mendapatkan senjata nuklir."

"Meskipun dia lebih suka

merundingkan resolusi untuk masalah lama Amerika dengan rezim Iran secara damai, dia tidak akan menunggu tanpa batas waktu jika Iran tidak bersedia berunding, dan segera," kata Hughes.

Laporan intelijen yang paling lengkap muncul pada awal Januari dan diproduksi oleh direktorat intelijen Kepala Staf Gabungan dan Badan Intelijen Pertahanan, kata Washington Post.

Laporan tersebut memperingatkan bahwa Israel kemungkinan akan mencoba menyerang fasilitas nuklir Fordow dan Natanz milik Iran.

Diketahui analisis intelijen yang dilakukan pada hari-hari terakhir pemerintahan Presiden AS Joe Biden ini menyimpulkan bahwa Israel telah mempertimbangkan serangan berskala besar terhadap situs nuklir Iran dan memanfaatkan kelemahan negara tersebut.

WSJ juga melaporkan Israel diperkirakan akan membujuk pemerintahan AS saat ini yang dipimpin Presiden Donald Trump untuk mendukung rencananya tersebut. Sebab, Trump dianggap Israel bakal ikut-ikutan rencana ini lantaran sang presiden telah menerapkan kebijakan keras dalam



Fasilitas militer Iran. (Foto: @IRIran_Military / X)

menghadapi Iran, musuh bebuyutan AS-Israel.

Sumber militer AS mengatakan kepada WSJ bahwa dukungan Amerika, termasuk dalam bentuk pasokan senjata, akan menjadi faktor krusial bagi Israel untuk berhasil menjalankan serangan ini.

Selain itu, dikutip Jerusalem Post, laporan tersebut juga menyebutkan Israel khawatir dengan keterbatasan waktu dalam melancarkan serangan ini. Sebab, peluang untuk menghentikan pengembangan nuklir Iran semakin menyempit.

Teheran dilaporkan kembali melancarkan pengembangan senjata kimia itu, terutama setelah AS keluar

dari perjanjian nuklir 2015 di periode pertama Trump menjabat. Trump juga telah menerapkan sanksi lagi kepada Iran.

Baik Kantor Perdana Menteri Israel maupun juru bicara Pasukan Pertahanan Israel (IDF) tidak memberikan tanggapan atas laporan ini.

Sementara itu, dalam sebuah wawancara dengan New York Post, Trump menyatakan bahwa ia lebih memilih menandatangani kesepakatan dengan Iran untuk menjadikannya negara non-nuklir daripada melancarkan serangan militer. (TRT World, Washington Post, New York Post, ist/nei)

Alternatif Pengganti Nasi karena Alasan Kesehatan

NASI merupakan makanan pokok di berbagai negara, khususnya di Asia, termasuk Indonesia. Sebagai sumber karbohidrat utama, nasi menyediakan energi yang diperlukan oleh tubuh untuk melakukan aktivitas harian.

Namun, sebagian orang mungkin ingin mencari alternatif pengganti nasi karena alasan kesehatan, seperti mengurangi asupan karbohidrat, menurunkan kalori dan gula darah, misalnya penderita diabetes. Bisa juga karena harga beras yang semakin mahal. Jika Anda berniat mengganti nasi, berikut beberapa pilihan yang sehat dan kaya nutrisi dan bila ingin mengurangi nasi karena alasan kesehatan, berbagai alternatif makanan berikut juga dapat dipilih untuk tujuan tersebut.

Nasi kembang kol

Kembang kol yang dicincang halus dapat digunakan sebagai alternatif rendah karbohidrat dan kalori untuk menggantikan nasi. Opsi ini cocok bagi yang menjalani diet keto atau memiliki intoleransi gluten. Dalam setiap 100 gram nasi kembang kol hanya mengandung 24 kalori, lebih dari 2 gram protein, serta 2,4 gram serat.

Nasi brokoli

Mirip dengan nasi kembang kol, nasi brokoli juga merupakan pilihan rendah kalori dan tinggi serat. Brokoli mengandung antioksidan serta vitamin C yang mendukung sistem imun. Setiap 100 gram nasi brokoli mengandung 29 kalori, 3,53 gram protein, serta 3,5 gram serat.

Kubis parut

Kubis dapat digunakan sebagai pengganti nasi karena rendah kalori dan kaya vitamin serta mineral. Kubis juga mengandung senyawa bioaktif yang dapat melindungi tubuh dari berbagai penyakit. Setiap 100 gram kubis mentah mengandung 25 kalori, 1,28 gram protein, serta 2,5 gram serat.

Shirataki

Terbuat dari akar konjac, nasi shirataki memiliki kandungan karbohidrat dan kalori yang sangat rendah. Makanan ini juga kaya serat glukomanan yang dapat membantu menurunkan kadar gula darah serta kolesterol. Dalam 100 gram nasi konjac hanya terkandung 10 kalori dan 5 gram serat.

Bulgur

Bulgur adalah gandum utuh yang rendah lemak dan kaya mineral. Makanan ini bermanfaat menjaga kadar gula darah bagi penderita diabetes. Setiap 100 gram bulgur mengandung 357 kalori, lebih dari 7 gram protein, serta 11,9 gram serat.

Kentang

Sebagai umbi-umbian yang telah dikonsumsi sejak zaman dulu, kentang mengandung berbagai nutrisi penting, termasuk antioksidan dan senyawa anti-inflamasi. Dalam 100 gram kentang mentah terdapat 74 kalori, 2 gram protein, serta 1,4 gram serat.

Ubi jalar

Ubi jalar kaya serat, vitamin, dan mineral yang bermanfaat bagi kesehatan jantung serta berpotensi melindungi tubuh dari penyakit kronis. Setiap 100 gram ubi jalar mentah mengandung 86 kalori, hampir 1,6 gram protein, serta 3 gram serat.

Singkong

Singkong mengandung karbohidrat yang lebih tinggi dibanding nasi, yakni hampir 40 gram per 100 gram. Selain karbohidrat, singkong juga kaya protein, serat, folat, vitamin B, vitamin C, dan kalium yang baik untuk kesehatan tubuh.

Jagung

Jagung merupakan sumber

karbohidrat sehat dengan kandungan sekitar 21 gram karbohidrat dan 3,4 gram protein per 100 gram. Selain memberikan rasa kenyang lebih lama, jagung juga mengandung vitamin A, vitamin B9 (folat), dan vitamin C. Untuk konsumsi yang lebih sehat, jagung dapat diolah dengan cara direbus, dikukus, atau dibuat menjadi nasi jagung.

Sagu

Sagu merupakan makanan tinggi karbohidrat yang banyak dikonsumsi di wilayah Indonesia Timur, biasanya diolah menjadi papeda. Selain karbohidrat, sagu juga mengandung protein, vitamin, mineral, dan serat yang baik untuk kesehatan.

Havermut

Havermut adalah makanan yang biasanya dikonsumsi sebagai sarapan. Havermut mengandung karbohidrat, protein, serat, beta-glukan, dan magnesium yang baik untuk kesehatan pencernaan, kolesterol, dan gula darah. Havermut bisa dicampur dengan susu, buah, kacang, atau madu untuk menambah rasa dan nutrisi.

Oatmeal

Oatmeal adalah bahan makanan pengganti nasi, yang sering dikonsumsi para pejuang diet. Oatmeal memiliki kandungan serat, yang bisa membuat perut kenyang lebih lama, mengontrol kadar gula darah dan menurunkan kadar kolesterol jahat.

Banyak yang mengira oatmeal terbuat dari gandum. Padahal oatmeal adalah makanan yang terbuat dari oat (*Avena sativa*). Oat dik

enal juga dengan nama "haver" yaitu jenis tanaman sereal yang tumbuh di negara-negara subtropis.

Sukun

Sukun yang sering dijadikan keripik ini ternyata juga dapat menjadi alternatif nasi. Sukun tinggi karbohidrat dan protein, serta rendah kalori. Sukun yang dibuat dalam bentuk tepung mengandung nilai gizi yang sama dengan nasi.

Roti gandum utuh

Roti gandum termasuk salah satu makanan tinggi serat yang juga bisa dijadikan sebagai pengganti nasi putih. Hal itu bukan tanpa alasan, sebab sepotong roti gandum yang setara dengan 46 gram diketahui mengandung serat sebanyak 4 gram. Di samping itu, roti gandum juga mempunyai indeks glikemik lebih rendah daripada nasi putih yang mampu membuat Anda merasa kenyang lebih lama dan membantu mengontrol kadar gula dalam tubuh.

Sagu

Kamu suka papeda? Atau jajan cilok? Ya, keduanya identik dengan sagu sebagai bahan baku pembuatannya. Sagu merupakan tepung hasil olahan batang rumbia. Makanan ini banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia di wilayah timur. Sagu kaya karbohidrat dan bisa dikonsumsi dengan lauk pendukung lain sebagai tambahan gizi. (nei,ist/dya)



Tesla Luncurkan Megafactory Baterai di Shanghai

TESLA, produsen mobil AS, meluncurkan Megafactory baru di Shanghai yang memproduksi baterai penyimpanan energi, atau Megapack. Fasilitas ini mulai beroperasi hari ini, menandai perluasan besar kehadiran Tesla di China.

Dengan kapasitas produksi tahunan awal sebanyak 10.000 unit atau sekitar 40 gigawatt-jam penyimpanan energi, Megafactory itu akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap target penyimpanan energi global Tesla.

Perusahaan itu memprediksi peningkatan penggunaan penyimpanan energi sebesar 50 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada 2025.

Menempati area seluas sekitar 200.000 meter persegi, pabrik baru di Shanghai tersebut melibatkan total investasi sekitar 1,45 miliar yuan (1 yuan = Rp2.237) atau sekitar 202 juta dolar AS (1 dolar AS = Rp16.350), menurut administrasi Kawasan Khusus Lin-gang di Zona Perdagangan Bebas Percontohan (Shanghai) China, lokasi fasilitas Tesla itu berada.

Menariknya, produksi massal di pabrik itu dimulai hanya delapan bulan setelah konstruksi dimulai,



menjadi contoh baru dari "kecepatan Tesla" di China.

Sebelumnya, Gigafactory Shanghai, pabrik pertama Tesla di pusat keuangan di China timur itu dibangun dan diresmikan dalam waktu satu tahun pada 2019.

"Sekali lagi, kita menyaksikan kecepatan yang luar biasa dari Shanghai dan Tesla. Saya merasa antusias karena (pengoperasian) pabrik ini akan mengawali tahun yang menarik bagi Tesla," ujar Wakil Presiden Tesla Mike Snyder dalam upacara peluncuran pabrik tersebut.

Ia juga menyatakan keyakinannya bahwa pabrik baru itu akan menjadi pondasi penting bagi jaringan produksi global Tesla.

Diketahui perusahaan otomotif asal Amerika Serikat ini hanya membutuhkan waktu tujuh bulan untuk mendirikan pabrik tersebut.

Disitat dari Car News China, uji coba pabrik ini sudah dilakukan pada akhir 2024. Pabrik ini juga jadi proyek penyimpanan energi pertama yang dimiliki Tesla di luar negara asalnya.

Pengerjaan pabrik ini sudah dimulai sejak bulan Mei 2024. Nantinya, Megafactory akan fokus pada produksi baterai dan penyimpanan energi yang diberi nama Megapacks.

Di China, sistem penyimpanan energi jadi bagian dari industri yang berkembang sangat pesat. Penggunaan utilitas dengan sistem ini

berguna dalam membantu jaringan listrik yang beroperasi secara stabil dengan penggunaan energi hijau karena juga menggunakan panel surya.

Dikutip dari Xinhua, Shanghai Megafactory dibangun di distrik Lingang di kawasan Pudong Shanghai. Pabrik ini juga sudah berencana meningkatkan kapasitasnya pada kuartal pertama.

Menariknya, pabrikan ini langsung mendapatkan konsumen yakni Shanghai Lingang Economic Development Group. Perusahaan itu sudah menjalin kontrak pesanan pertama untuk penyimpanan energi Megapack pada Mei tahun ini.

Namun, tesla tidak sendiri di China ada perusahaan lain yang juga mengembangkan infrastruktur penyimpanan energi mulai dari BYD, Star Charge, CATL, GoodWe, dan beberapa perusahaan lain.

Sehingga persaingan di bidang ini pastinya bakal lebih ketat. Saat ini BYD dan CATL juga sebagai salah satu pemasok sel baterai untuk Megafactory.

Lebih lanjut, Tesla Megapack mampu menyimpan lebih dari 3 MWh energi. Sumber tenaga tersebut setara dengan memberikan daya untuk 3.600 rumah di Shanghai selama satu jam. (nei,ist/dya)



HARIAN
LENERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO I GRESIK: ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) I MOJOKERTO: NUR HIDAYAH I LAMONGAN: L HANDI I BLITAR: ARIEF SUKAPUTRA I KEDIRI: GATOT SUNARKO I JOMBANG : SUTONO I PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO : IMAN SANTOSO I BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI: PURCAHYONO JULIATMOKO I MADIUN: WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) I MALANG RAYA: SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. I MADURA RAYA: SAHLAN KURNIAWAN I TRENGGALEK: TINA W I NGAWI: DIMAS RIDHO SURYO BASKORO I DKI JAKARTA: FUAD HASSAN I LOMBOK BARAT: MUHAYYAN I PALANGKA RAYA: NOVITA MASNIARI

MEDIA TERVERIFIKASI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH I MARKETING COMMUNICATION JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN I SEKERTARIS FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN I ALAMAT REDAKSI JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 I TELP 03187854491 I PENERBIT PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA I ALAMAT PERCETAKAN SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA I TELP IKLAN 031-87854491 I NIB 91205006801134 I HARGA IKLAN RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

Pantai Ora Maluku Sebanding dengan Maladewa

SEKARANG, menikmati keindahan pantai seperti di Hawaii atau Maladewa tidak harus jauh dan mahal. Indonesia memiliki keindahan alam yang serupa, seperti di Pantai Ora, Maluku Tengah, yang menawarkan resort dan fasilitas pariwisata yang tidak kalah dengan negara-negara luar.

Pantai Ora adalah sebuah pantai eksotis yang tepat untuk menggantikan Maladewa. Pantai Ora ini terletak di kota Maluku dan dianggap spesial karena memiliki latar belakang sebuah pantai dengan air lautnya yang sebening kaca.

Bahkan Pantai Ora merupakan pantai yang masuk dalam jajaran pantai pantai paling cantik di Indonesia.

Keindahan yang luar bisa tersebutlah yang menjadikan banyak orang yang berkunjung ke Pantai Ora ini seakan sedang berada di Maladewa.

Memiliki laguna dengan pantai tenang yang berair jernih disertai banyak penginapan yang sengaja dibangun di atas air, semakin mensejajarkan nama Pantai Ora dengan Maladewa.

Selain itu Pantai Ora memukau pengunjung dengan pasir putihnya yang halus dan pemandangan indah. Keunikan pantainya terletak pada hamparan laut dangkal yang menjorok ke daratan, menjadi rumah bagi ratusan ribu terumbu karang menawan dan penghuninya. Keindahan terumbu karang dan ikan-ikan di dalamnya sudah dapat disaksikan dari permukaan air tanpa

perlu menyelam atau snorkeling.

Bagaimana rute perjalanan menuju Pantai Ora?

Aksesibilitas untuk mencapai Pantai Ora dapat dikatakan cukup sulit. Hal ini dikarenakan lokasi Pantai Ora yang jauh dari pusat kota. Untuk menuju Pantai Ora terdapat 2 alternatif jalur yang dapat digunakan yakni jalur laut dan jalur Udara. Bila melalui jalur laut dapat dimulai dengan perjalanan menuju Bandara Pattimura, Ambon.

Dilanjutkan dengan perjalanan menuju pelabuhan Tuhelu menggunakan anggota umum. sesampainya di Pelabuhan Tulehu, kalian harus naik kapal ferry ke Pelabuhan Amahai sekitar dua jam dengan kapal cepat seharga Rp150.000,00 untuk VIP dan Rp92.000,00 untuk ekonomi.

Dari pelabuhan Amahai akan dilanjutkan ke desa Sawai menggunakan angkutan umum setelah itu menuju Pantai Ora menggunakan perahu selama sepuluh hingga lima belas menit.

Jalur udara dapat ditempuh menggunakan jasa pesawat perintis menuju Bandara Wahai, kemudian perjalanan dilanjutkan dengan menggunakan kapal cepat untuk menyebrang ke pelabuhan Amahai, Pulau Seram lalu dilanjutkan dengan perjalanan laut dengan waktu tempuh sekitar 2 jam.

Meskipun harus melalui perjalanan panjang, akan terbayarkan

dengan pemandangan alam selama perjalanan.

Daya tarik yang menarik perhatian wisatawan

Keindahan panorama alam bukanlah satu-satunya daya tarik yang dimiliki oleh Pantai Ora. Air laut biru jernih yang menyimpan banyak kejutan didalamnya. Kekayaan biota laut yang dimiliki Pantai Ora merupakan surga dunia bagi para penyelam.

Para penyelam hanya perlu menyelam sedalam dua hingga tiga meter dan akan menemui berbagai biota laut yang unik dan indah.

Tak hanya menyelam, wisatawan dapat juga berkunjung Taman Nasional Manusela karena berdekatan dengan Pantai Ora. Taman Nasional Manusela memiliki tujuh belas jenis burung dengan empat belas diantaranya adalah jenis burung endemik.

Keindahan panorama alam yang dibentuk oleh Pantai Ora didukung dengan tebing-tebing Sawai, hutan tropis, dan rangkaian penguungan yang merupakan kawasan Taman Nasional Manusela.

Daya tarik lain yang dimiliki oleh Pantai Ora adalah budaya tradisional warga lokal. Hal ini dikarenakan Pantai Ora berada diantara dua desa yang memungkinkan terjadinya percampuran budaya di area pantai Ora. Pantai Ora sendiri telah dilengkapi dengan fasilitas akomodasi yakni resorts yang berada di atas air pantai dengan arsitektur rumah atas air

sehingga wisatawan dapat menikmati pemandangan laut setiap hari.

Namun sayangnya fasilitas lain seperti Tourism Information Center (TIC) dan fasilitas lainnya belum memadai. Potensi wisata yang ada masih dikelola secara mandiri oleh masyarakat sehingga masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam pengelolaan.

Meskipun demikian Pantai Ora sudah masuk dalam paket wisata alam yang kini dikelola oleh berbagai travel agent. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat juga melakukan promosi untuk mendukung pariwisata maritim yang dimiliki.

Ekstotisme Pantai Ora yang belum banyak tereksplorasi ini menjadi potensi besar untuk dapat dikembangkan sebagai tempat wisata unggulan di Indonesia, khususnya di bagian timur Indonesia.

Pantai Ora merupakan salah satu potensi terbesar yang dimiliki Maluku. Seharusnya, tempat ini dapat menjadi sumber penghasilan bagi warga setempat, baik dari sektor pariwisata maupun sektor ekonomi. Dibandingkan dengan objek wisata lain di Maluku Tengah, Pantai Ora memiliki keunggulan dalam hal promosi.

Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika masyarakat dan pemerintah bekerja sama bahu-membahu dalam pengembangan wilayah ini. Hal ini merupakan peluang untuk Indonesia menunjukkan diri dimata dunia melalui destinasi wisata di sisi terluar Indonesia. (nei,ist/dya)

Sinyal Penghematan ... (dari Hal 1)

BESARAN efisiensi anggaran yang telah Presiden Prabowo Subianto lakukan untuk belanja Kementerian atau lembaga (K/L) melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 akan menjadi acuan penyusunan belanja pemerintah pusat untuk tahun anggaran 2026.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan hal ini saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Kamis (13/2/2025).

"Akan dijadikan sebagai baseline kalau ini menciptakan sebuah budaya baru untuk efisiensi dari birokrasi di seluruh K/L, sehingga tentunya nanti hasil dari 2025 akan digunakan untuk penyusunan 2026 juga," ucap Sri Mulyani di Ruang Rapat Komisi XI DPR, Jakarta.

Ia mengatakan, dengan mekanisme pemangkasan anggaran belanja pemerintah pusat pada tahun ini senilai Rp 306,69 triliun, maka ke depan pola belanja pemerintah pusat akan lebih efisien dan terukur.

Menurut Sri Mulyani, efisiensi anggaran senilai Rp 306,69 triliun itu tidak akan mengubah postur APBN 2025 yang nilai belanjanya sebesar Rp 3.621,3 triliun. Sebab, belanja pemerintah pusat yang terpengkas itu diarahkan untuk program-program prioritas pemerintah untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat.

"Diharapkan akan menciptakan sebuah budaya baru, penekanan kepada pelaksanaan tugas secara efisien, secara cepat, secara baik, pelayanan publik tidak dikorbankan dan tentu berbagai target-target tidak akan kita lakukan pengurangan," tuturnya.

Kompak Tepis Beasiswa Terdampak

Salah satu yang menjadi sorotan akibat penghematan anggaran adalah sektor pendidikan. Viral beredar berbagai beasiswa tingkat mahasiswa dipangkas bahkan tak ada lagi.

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiknas) adalah salah satu kementerian yang terkena efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025. Menurut Sekretaris Jenderal Kemendiknas Togar M. Simatupang, kementerianya terkena pemangkasan anggaran sebesar Rp 22,5 triliun dari total pagu anggaran 2025 Rp 57,6 triliun.

Meski demikian, Togar mengatakan Kemendiknas akan memastikan dana beasiswa tidak menjadi subjek yang dipangkas dalam efisiensi anggaran pemerintahan. "Untuk beasiswa tidak mengalami program efisiensi," kata dia di Jakarta pada Kamis, (13/2/2025).

Togar menegaskan Komisi X DPR menekankan anggaran beasiswa, yang merupakan bagian dari komponen anggaran belanja sosial, tidak menjadi hal yang terkena efisiensi anggaran pemerintah. "Jadi sudah ditegaskan oleh Komisi X, tidak ada pengaruh pada belanja sosial, dalam hal ini beasiswa," ujarnya.

Karena itu, dia memastikan para mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan baik di dalam maupun luar negeri tidak akan telantar. Dia juga menyebutkan anggaran beasiswa tidak terganggu dengan pengurangan anggaran lain yang berdampak efisiensi. "Karena sudah ada penegasan, maka sudah aman, tidak mengalami gangguan," ucap Togar.

Sebelumnya, sejumlah anggaran beasiswa yang dikelola Kemendiknas akan berpotensi dikurangi menyusul adanya efisiensi anggaran pemerintah. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiknas) Satryo Soemantri Brodjonegoro memaparkan sejumlah anggaran beasiswa yang dipangkas di antaranya beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK), Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI), beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (Adik), beasiswa Kerja Sama Negara Berkembang (KSNB), serta beasiswa dosen dan tenaga pendidik di dalam maupun luar negeri.

"Beasiswa ada KIP kuliah, pagu awalnya Rp 14,698 triliun, kemudian efisiensi oleh Ditjen Anggaran (Kemenkeu) sebesar Rp 1,31 triliun, (besarnya) 9 persen. Kami usulkan kembali supaya tetap pada pagu semula, yaitu Rp 14,698 triliun, karena ini termasuk kategori yang tidak kena efisiensi," kata Satryo dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, (12/2/2025).

Kemudian, pada program BPI dan Beasiswa Adik, Satryo menjelaskan efisiensi anggarannya sebesar 10 persen dari pagu awal sejumlah masing-masing Rp 194 miliar dan Rp 213 miliar. Adapun pada Beasiswa KSNB serta dosen dan tenaga kependidikan, efisiensi anggarannya sebesar 25 persen dari pagu awal sejumlah masing-masing Rp 85 miliar dan Rp 236 miliar.

Dalam rapat kerja tersebut, Satryo juga menyebutkan akan mengupayakan komponen dalam pos anggaran non-efisiensi agar tidak terdampak pemangkasan anggaran. Dia mengatakan prinsip dasar anggaran yang dialokasikan untuk Kemendiknas adalah dana "numpang lewat".

Sebab, kata dia, sebagian besar dana tersebut akan langsung disampaikan ke perguruan tinggi (PT) penerima serta mahasiswa penerima beasiswa. Menurut dia, kurang dari 10 persen dari total anggaran tersebut yang dikelola Kemendiknas

"Artinya, kalau (anggaran) yang disampaikan langsung kepada perguruan tinggi, atau mahasiswa, atau dosen, itu sangat tidak mungkin dilakukan efisiensi," tuturnya.

Adapun komponen yang akan diupayakan agar tidak terdampak pemangkasan anggaran, yakni gaji dan tunjangan pegawai, tunjangan dosen non-PNS, serta bantuan sosial berupa beasiswa.

Satryo mengatakan, dalam pemangkasan anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan meminta agar dana untuk pos non-efisiensi secara total dikurangi 7 persen atau senilai Rp 2,108 triliun. Dengan demikian, pagu awal yang semula Rp 31,645 triliun berkurang menjadi Rp 29,537 triliun. "Kami usulkan kembali, supaya tetap pada pagu semula karena ini kategori yang tidak kena efisiensi," ujarnya.

Melalui paparan Satryo, diketahui DJA Kemenkeu meminta pemangkasan untuk komponen gaji dan tunjangan pegawai yang bernilai Rp 13,512 triliun. Namun DJA meminta pemotongan dilakukan di komponen lainnya.

Untuk pos bantuan sosial atau beasiswa, misalnya, DJA Kemenkeu meminta sebanyak Rp 1,310 triliun atau 9 persen dari pagu total program KIPK dipotong. Begitu pula dengan beasiswa KSNB yang diminta dipotong sebanyak 25 persen atau sebesar Rp 21,337 miliar dari Rp 85,348 miliar pada pagu awal.

Begitu pula dengan beasiswa ADIK dan BPI yang sama-sama diminta dipotong sebanyak 10 persen dari pagu awal serta beasiswa dosen dan tenaga pendidik di dalam maupun luar negeri agar anggarannya dipotong sebanyak 25 persen dari pagu awal.

Karena hakikat program-program tersebut yang tidak seharusnya terkena pemangkasan, Satryo melakukan rekonstruksi anggaran dan akan mengusulkan 0 persen pemangkasan untuk komponen dalam anggaran non efisiensi pada rapat selanjutnya dengan Kementerian Keuangan. "Sehingga untuk komponen ini, gaji, tunjangan, dan beasiswa, pagu yang kami usulkan yaitu pagu semula sebesar Rp 31,645 triliun," ujarnya.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga memastikan program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) tidak akan terdampak oleh kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pada tahun 2025.

Kemenkeu telah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 8,9 triliun dalam APBN 2025. Efisiensi ini mencakup berbagai pengurangan belanja operasional, termasuk perjalanan dinas, pengadaan peralatan, serta seremonial.

Direktur Utama LPDP, Andin Hadiyahanto, menegaskan seluruh

penerima beasiswa LPDP yang saat ini sedang menempuh pendidikan tidak akan terpengaruh oleh efisiensi anggaran.

"Semua beasiswa yang sedang belajar nggak terpengaruh sama sekali pasti," kata Andin di Kompleks Parlemen RI, Kamis (13/2/2025).

Saat ditanya mengenai kemungkinan dampak terhadap penerima beasiswa di tahun-tahun berikutnya, Andin menyatakan proses evaluasi masih berlangsung.

"Yang untuk Kemenkeu sementara sedang kita evaluasi. Tapi untuk LPDP oke aja, aman," tegasnya.

Andin menjelaskan, anggaran beasiswa LPDP berasal dari dana abadi. Sehingga tidak masuk dalam kategori belanja yang terkena pemangkasan. "Dari dana abadi, jadi aman," ungkapnya. (wid, din, ist, rls, ant/dya)

RINCIAN PEMOTONGAN

ANGGARAN MPR RI:

- Silatutrami kebangsaan menjadi dari 3 kali menjadi 1 kali dalam setahun
- Kunjungan delegasi Pimpinan MPR RI ke daerah semula 70 kali menjadi 35 kali dalam setahun
- Kunjungan Delegasi Pimpinan MPR ke Negara Sahabat dari 9 kali menjadi 4 kali dalam setahun
- Pelaksanaan Temu Tokoh Nasional/ Kepemudaan/ Keagamaan/Sivitas Akademika dari 18 kali menjadi 9 kali dalam setahun
- Sosialisasi Empat Pilar oleh Seluruh Anggota MPR Di Daerah pemilihan dari 6 kali menjadi 3 kali dalam setahun
- Sosialisasi Empat Pilar kepada Instansi/ Ormas/Orpol dari 200 kali menjadi 100 kali dalam setahun
- Pendidikan Penguatan Empat Pilar untuk Generasi Muda dari 34 kali menjadi 17 kali dalam setahun
- Rapat Pimpinan, Rapat Pleno, Rapat Kelompok, Rapat Tim Perumus Badan Pengkajian dari 5 kali menjadi 2 kali dalam setahun
- Penyerapan Aspirasi Masyarakat oleh Anggota MPR dari 1 kali menjadi tidak dilakukan sama sekali.
- Rapat Pimpinan Pleno, Rapat Pleno, Rapat Kelompok, Rapat Perumus Komisi Kajian Ketatanegaraan dari 5 kali menjadi 2 kali dalam setahun
- Focus Group Discussion (FGD) Badan Penganggaran MPR dari 14 kali menjadi 7 kali dalam setahun
- Sarasehan Anggota Badan Penganggaran dari 30 kali menjadi 15 kali dalam setahun
- Evaluasi dan Penguatan Program Kegiatan MPR dari 20 kali menjadi 10 kali dalam setahun
- Lokakarya Akademik Fraksi/Kelompok DPD dari 10 kali menjadi 5 kali dalam setahun
- Diskusi Publik Fraksi/Kelompok DPD dari 20 kali menjadi 20 kali dalam setahun
- Renovasi Ruang Fraksi / Kelompok DPD dan ruang kerja alat kelengkapan menjadi tidak dilakukan sama sekali.

Sumber: Dirangsum dari pemaparan dalam rapat dengan Komisi XI DPR Kamis, 13 Februari 2025

Sidang Hanya 24 Menit, Praperadilan Hasto Ditolak

JAKARTA-Selama sepekan, sidang praperadilan Hasto Kristiyanto digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang berjalan cukup alot. Bahkan sempat berlangsung hingga 12 jam.

Namun, sidang putusan pada Kamis (13/2) berlangsung cukup singkat. Hanya butuh waktu 24 menit bagi Hakim Tunggal Djuyamto untuk membacakan putusan bila gugatan praperadilan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditolak.

Dalam pertimbangannya, hakim tunggal Djuyamto, menyatakan tidak perlu mempertimbangkan pokok permohonan Hasto. Sebab, gugatan tersebut kandas dari sisi formil.

Hakim Djuyamto mengabulkan eksepsi pihak termohon dalam hal ini KPK. Eksepsi yang dikabulkan yakni soal permohonan praperadilan yang dinilai tidak memenuhi syarat formil.

Djuyamto mengatakan, setelah mempelajari dan mencermati permohonan Hasto dan jawaban KPK, penetapan tersangka didasari atas dua surat perintah penyidikan.

Menurut Djuyamto, penetapan tersangka terhadap pemohon dengan dua surat perintah penyidikan tersebut terkait dengan dugaan dua tindak pidana yang berbeda yang disangkakan kepada Hasto, yakni dugaan tindak pidana perintangan penyidikan dan dugaan tindak pidana memberi janji atau hadiah kepada penyelenggara negara.

Terkait penyidikan itu, pihak Hasto mendalilkan bahwa penetapan tersangka tidak didukung oleh dua alat bukti permulaan yang cukup. Bahkan, alat bukti itu telah digunakan dalam putusan pengadilan yang berstatus berkekuatan hukum alias inkrah. Sehingga pihak Hasto meminta status tersangka dibatalkan.

"Maka timbul pertanyaan: apakah waktu di perkara lain yang dimaksud pemohon tersebut adalah digunakan untuk dugaan tindak pidana merintangi penyidikan, berdasarkan sprindik nomor 152 atau untuk dugaan tindak pidana memberi hadiah atau janji kepada penyelenggara negara sebagaimana sprindik 153 atau digunakan dalam kedua dugaan tindak pidana tersebut sekaligus?" kata hakim.

"Jika mendasarkan dalil permohonan pemohon maupun dalil termohon, bahwa perkara yang sudah inkrah adalah perkara suap atas nama Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fredilina, sedangkan tidak ada perkara perintangan penyidikan yang sudah inkrah sebelumnya," sambung hakim.

Menurut hakim, hal itu perlu untuk dijawab dalam praperadilan. Sebab,



Suasana sidang putusan gugatan praperadilan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (13/2/2025).ist

pihak Hasto memperlumahkan penetapan tersangka dalam dua tindak pidana yang dinilai tidak didukung alat bukti permulaan yang cukup.

Terlebih, kata hakim terkait hal tersebut, lazimnya pembuktian terhadap dua tindak pidana yang berbeda tentu menggunakan alat bukti yang berbeda pula.

"Maka konsekuensinya tidak menutup kemungkinan terhadap alat bukti yang digunakan pada masing-masing tindak pidana berbeda dan tentunya berpotensi mempengaruhi hasil penilaian hakim atas keabsahan alat bukti permulaan yang digunakan penetapan status tersangka ke dua dugaan tindak pidana tersebut yang bisa saja pada saat penetapan tersangka pada satu dugaan tindak pidana dinyatakan sah sedangkan pada penetapan tersangka pada dugaan tindak pidana lainnya

dinyatakan tidak sah oleh hakim," ujar Djuyamto.

Hal tersebut, kata Djuyamto, menyulitkan hakim dalam pertimbangan amar putusan praperadilan. Padahal, sebagaimana pasal 2 butir 4 peraturan MA Nomor 4 Tahun 2016 tentang putusan praperadilan, bahwa praperadilan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka dilakukan pemeriksaannya secara singkat.

"Menimbang oleh karena hal tersebut hakim berpendapat permohonan pemohon seharusnya diajukan dalam dua permohonan praperadilan bukan dalam satu permohonan," kata Djuyamto.

"Menimbang bahwa dengan demikian permohonan pemohon yang menggabungkan tentang sah tidaknya surat perintah penyidikan atau sah tidaknya penetapan tersangka dalam satu permohonan haruslah dinyata-

kan tidak memenuhi syarat formil permohonan praperadilan," sambungnya.

Maka, kata dia, eksepsi pihak KPK beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan.

"Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas hakim berpendapat oleh karena eksepsi A2 dikabulkan maka terhadap eksepsi termohon yang lain dan seluruhnya tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum," ujarnya.

"Oleh karena eksepsi termohon dikabulkan terhadap pokok perkara ini tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi sehingga dengan demikian hakim berpendapat bahwa permohonan praperadilan dari pemohon adalah dinyatakan tidak dapat diterima," pungkasnya. (ist, din, wid, rls/dya)

Dua Surat Perintah Penyidikan Hasto:

- Sprin/dik/152/dik.00/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024 atas nama Hasto Kristiyanto atau pemohon dalam dugaan perintangan penyidikan.
- Sprin/dik/153/dik.00/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024 atas nama Hasto Kristiyanto atau pemohon dengan dugaan memberi hadiah atau janji kepada penyelenggara negara.

Pengacara Pertimbangkan Ajukan Lagi



Tim hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

PENGACARA Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Maqdir Ismail, mengatakan pihaknya kini tengah mempertimbangkan opsi untuk kembali mengajukan gugatan praperadilan.

Opsi tersebut usai Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak

menerima gugatan praperadilan Hasto. Alasannya, Hasto yang berstatus tersangka dalam dua perkara, yakni dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku, disebut seharusnya mengajukan permohonan dalam dua gugatan.

"Apakah akan kami ulangi lagi dengan mengajukan dua permohonan, tentu nanti kita akan sampaikan," kata Maqdir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (13/2/2025).

Namun demi-kian, Maqdir masih

menunggu ke-putusan dari Hasto langsung. Apakah ingin mengajukan praperadilan kembali atau mengambil opsi hukum lainnya.

"Itu salah satu di antaranya yang kami pertimbangkan. Tapi ini juga tergantung dengan Mas Hasto. Apakah juga mungkin ada tindakan-tindakan hukum yang lain tentu juga akan kita pertimbangkan," ujar dia.

Saat disinggung soal adanya bukti baru dalam permohonan praperadilan selanjutnya, Maqdir menjawab diplomatis.

"Nanti kita akan coba lihat, apakah bukti-bukti yang kemarin itu sudah cukup atau belum dan tentu saja kami akan mencoba mencari bukti-bukti yang lain terkait dengan permohonan kalau seandainya kami lakukan praperadilan kembali," tuturnya. (wid, kum, ist/dya)